

EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

LALU MUH. KABUL

Universitas Teknologi Mataram

kabullpp@yahoo.com

ABSTRAK

Ruang lingkup penelitian ini adalah evaluasi proses dan evaluasi hasil. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis evaluasi proses dan evaluasi hasil. Dalam penelitian ini digunakan mixed methods yakni kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi penanggulangan stunting di desa lokus meliputi 8 aksi terintegrasi dimana capaian dari masing-masing aksi sepenuhnya 100 persen sesuai dengan target. Penanggulangan stunting di desa lokus berpengaruh signifikan terhadap hasil (*outcome*) yakni penurunan angka prevalensi stunting. Sebagai tambahan, terdapat korelasi negatif sangat kuat antara jumlah desa lokus dengan angka prevalensi stunting.

Kata kunci: *Evaluasi kebijakan, penanggulangan, stunting*

ABSTRACT

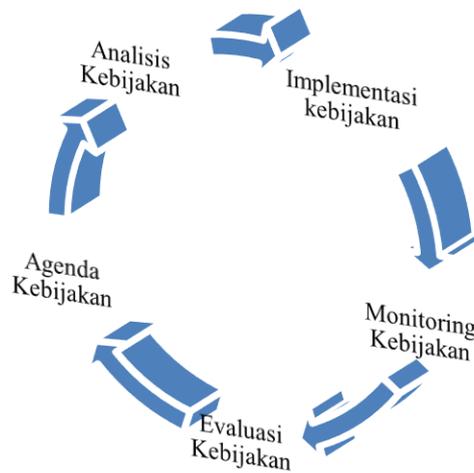
The scope of the study is process evaluation and outcome evaluation. The aim of the study is to analysis an evaluation process and outcome evaluation. The study method used is mixed methods, namely quantitative and qualitative. The result of study showed that implementation process of stunting intervention at locus village include 8 integrated actions where each action has been fully achieved target 100 percent. Stunting intervention at locus village significantly influence to the outcome namely decreasing of stunting prevalency. In addition, there is very strong negative correlation between amount of locus village and stunting prevalency.

Keywords: *Policy evaluation, intervention, stunting*

PENDAHULUAN

Istilah administrasi publik berasal dari kata “minor” kemudian “ministrare” dalam bahasa Latin yang berarti melayani kemudian memerintah (Hughes, 2003). Lebih jauh Chandler dan Plano (1988) dalam Keban (2019) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan proses dimana berbagai sumberdaya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik selain merupakan ilmu, juga seni. Menurut Rosenbloom (1986) dalam Hughes (2003) bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Menurut Keban (2019) bahwa salah satu dimensi strategis dalam administrasi publik adalah kebijakan publik. Lebih jauh sebagaimana dinyatakan oleh Quade (2012) bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah. Sedangkan Shafritz dan Russel (2017) mendefinisikan kebijakan publik yakni apapun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Disisi lain, Fischer et al (2013) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan aksi pemerintah dalam menghadapi masalah dengan mengarahkan perhatian terhadap siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana.



Gambar 1. Tahapan Kebijakan Publik

Tahapan kebijakan publik sebagaimana dikemukakan Dunn (2004) meliputi penetapan agenda kebijakan (“agenda setting”), formulasi kebijakan (“policy formulation”), adopsi kebijakan (“policy adoption”), implementasi kebijakan (“policy implementation”), dan penilaian kebijakan (“policy assessment”). Disisi lain, sebagaimana dinyatakan Keban (2019) bahwa tahapan kebijakan publik meliputi analisis kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka tahapan kebijakan publik merupakan suatu siklus sebagaimana ditampilkan pada gambar 1 yang meliputi agenda kebijakan, analisis kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan.

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk perbaikan atau penyempurnaan agenda kebijakan. Dimana agenda kebijakan diformulasikan dari berbagai masalah publik. Tidak semua masalah publik yang bisa diformulasikan menjadi agenda kebijakan. Dalam pada itu, masalah publik yang diformulasikan menjadi agenda kebijakan tersebut dikenal dengan masalah inti (“core problem”). Dalam analisis kebijakan, dilakukan formulasi mengenai apa yang menjadi akar penyebab masalah selanjutnya dicari berbagai solusi alternatif pemecahan masalah yang akan diadopsi dalam implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan meliputi evaluasi proses, evaluasi hasil, dan evaluasi dampak (Keban, 2019 ; Anderson, 2015). Dalam penelitian ini evaluasi kebijakan yang dimaksud adalah evaluasi proses dan evaluasi hasil.

Disisi lain, evaluasi perlu dibedakan dengan monitoring (UNDP, 2021 dan Kabul, 2015). Perbedaannya yaitu monitoring dilakukan secara terus-menerus, sedangkan evaluasi dilakukan secara periodik. Monitoring dilakukan selama implementasi; sedangkan evaluasi dapat dilakukan sebelum implementasi, selama implementasi dan sesudah implementasi. Monitoring dilakukan oleh pihak internal, sedangkan evaluasi dilakukan oleh pihak eksternal. Kebijakan penanganan stunting secara nasional diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang kemudian diganti menjadi Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting. Dimana Pepres dimaksud bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah untuk perbaikan gizi, utamanya penurunan stunting, juga bertepatan dengan satu dekade lebih bergabungnya Indonesia dengan gerakan global *Scaling Up Nutrition* sejak tahun 2011 dengan fokus pada upaya pengentasan gizi melalui keterlibatan lintas sektor.

Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting tersebut kemudian diderivasi dalam bentuk kebijakan penanganan stunting di daerah baik di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Lombok Timur yakni diterbitkannya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 68 Tahun 2020 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penurunan Stunting. Evaluasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur perlu dilakukan untuk menilai seberapa jauh penanganan stunting telah membuahkan hasil. Hal ini senada dengan evaluasi kebijakan publik sebagaimana dikemukakan Muhadjir dalam Widodo (2008) bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai mengenai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil.

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai evaluasi kebijakan mengenai penanggulangan stunting antara lain telah dilakukan oleh Gusmiyati dan Rahmadani (2022) dengan fokus pada evaluasi dampak kemudian Novasetianie et al (2023) dan Aria Phitra et al (2023) dimana penelitian kedua peneliti ini fokus pada evaluasi proses. Disisi lain, penelitian sebelumnya mengenai evaluasi kebijakan penanganan stunting juga dilakukan oleh Wardani Z. (2021) dengan fokus pada evaluasi hasil. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dimana fokus penelitian ini tidak hanya pada evaluasi proses, melainkan juga pada evaluasi hasil.

Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan evaluasi proses penanggulangan stunting di Kabupaten Lombok Timur (2) Bagaimana pelaksanaan evaluasi hasil penanggulangan stunting di Kabupaten Lombok Timur.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: (1) Menganalisis pelaksanaan evaluasi proses penanggulangan stunting di Kabupaten Lombok Timur (2) Menganalisis pelaksanaan evaluasi hasil penanggulangan stunting di Kabupaten Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *mixed methods* (Johnson RB et al, 2017 ; Kabul et al, 2021) yakni pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 (lima) bulan di Kabupaten Lombok Timur yakni September 2023 sampai dengan Januari 2024. Disisi lain sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa data kuantitatif maupun kualitatif dikumpulkan dari responden sampel melalui wawancara mendalam (“indepth interview”) dan “Focus Group Discussion/FGD”. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Bappeda, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas P3AKB, dan lain-lain.

Variabel dan Analisis Data

Variabel dalam penelitian ini meliputi evaluasi proses dan evaluasi hasil. Dalam pada itu, data kuantitatif dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis Beta (β) dimana dalam analisis Beta (β) sebuah program dinyatakan berhasil. jika diperoleh koefisien regresi (β) bernilai negatif dalam periode waktu tertentu. (Holzinger, 2006 ; Kabul, 2023). Sedangkan data kualitatif dari kedua variabel tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman & Saldana (2014) dengan tahap-tahap analisis meliputi: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, kesimpulan/verifikasi.

Pertama, kondensasi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah dikondensasi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Kedua, penyajian data, di mana setelah data dikondensasi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami. Data disajikan dalam bentuk teks yang naratif. Ketiga, penarikan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang dibangun merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Proses

Proses penanggulangan stunting dilaksanakan melalui 8 (delapan) aksi terintegrasi yaitu: aksi 1 (analisis situasi), aksi 2 (rencana kegiatan), aksi 3 (rembuk stunting), aksi 4 (perbup peran desa), aksi 5 (pembinaan kader pembagunan manusia/KPM), aksi 6 (sistem manajemen data), aksi 7 (pengukuran dan publikasi data stunting), aksi 8 (review kinerja tahunan). Pertama, aksi 1 (analisis situasi) dilakukan untuk menganalisis sebaran prevalensi stunting, analisis potensi pendukung program stunting, analisis permasalahan stunting, dan solusi alternatif pemecahan masalah sebagai rekomendasi rencana kegiatan. Penanggulangan stunting di Kabupaten Lombok Timur difokuskan pada “desa lokus” dengan kriteria yaitu; memiliki prevalensi stunting melebihi rata-rata, jumlah kasus stunting melebihi rata-rata, dan memiliki lebih dari 50 persen indikator utama menunjukkan cakupan intervensi tergolong kurang. Berdasarkan kriteria tersebut lokasi fokus penanggulangan stunting di Lombok Timur meliputi 91 desa dengan rincian sebanyak 10 desa pada tahun 2019, 22 desa pada tahun 2020, 30 desa pada tahun 2021 dari 29 desa pada 2022. Penanggung jawab dalam aksi 1 (analisis situasi) adalah Bappeda. Aksi 1 (analisis situasi) ini sudah diimplementasikan dengan capaian output (100 persen) sesuai dengan target (100 persen).

Kedua, aksi 2 (rencana kegiatan) merupakan rekomendasi hasil analisis situasi yang kemudian di realisasikan dalam rencana kegiatan OPD dan kemudian diintergrasikan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan

rencana kerja (Renja) OPD pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Penanggung jawab dalam aksi 2 (rencana kegiatan) adalah Bappeda. Aksi 2 (rencana kegiatan) tersebut sudah diimplementasikan dengan capaian output (100 persen) sesuai dengan target (100 persen). Ketiga, aksi 3 (rembuk stunting) dilakukan untuk memastikan terciptanya integrasi antara OPD dengan sektor/lembaga non pemerintah seperti LSM, Ormas media massa dan masyarakat. Dalam rembuk stunting dilakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergi antara analisis situasi dan rencana kegiatan OPD dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat desa yang dihasilkan melalui Musrenbangdes. Penanggung jawab dalam aksi 3 (rembuk stunting) ini adalah Sekda. Disisi lain, aksi 3 (rembuk stunting) dimaksud sudah diimplementasikan dengan capain output (100 persen) sesuai dengan target (100 persen).

Keempat, aksi 4 (Perbup Peran Desa) dilakukan agar penanggulangan stunting di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa terintegrasi yang dituangkan dalam RKPDes dan didanai dari alokasi dana desa yang dituangan dalam APBDDes. Mengenai peran desa dalam penanggulangan stunting di Lombok Timur telah diterbitkan Perbup Nomor 48 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 31 tahun 2017 tentang Penurunan Stunting. Dalam pada itu, penanggung jawab aksi 4 (Perbup Peran Desa) adalah Dinas PMD. Kelima, aksi 5 (pembinaan Kader Pembangunan Manusia/KPM) dilakukan untuk membina KPM agar berperan optimal membantu desa dalam penanggulangan stunting. Dana untuk insentif dan operasional KPM dialokasikan dari dana desa. Penanggung jawab aksi 5 (pembinaan KPM) adalah Dinas PMD.

Keenam, aksi 6 (sistem manajemen data) berperan untuk menyediakan dan mempermudah akses data untuk mendukung aksi 1, aksi 2, dan aksi 8. Dalam sistem manajemen data digunakan sistem elektronik yakni elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (eppgm). Penanggung jawab aksi 6 (sistem manajemen data) adalah Bappeda. Ketujuh, aksi 7 (pengukuran dan publikasi data stunting) dilakukan agar terdeteksinya balita stunting kemudian ditindak lanjuti oleh KPM dengan konseling balita stunting tersebut ke Posyandu. Bila tidak hadir di Posyandu, maka dilakukan kunjungan rumah. Hasil pengukuran divalidasi ke Puskesmas kemudian dipublikasikan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupten. Penanggung jawab aksi 7 (pengukuran dan publikasi data stunting) adalah Dinas Kesehatan. Kedelapan, aksi 8 (review kinerja tahunan) dilakukan terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan stunting selama satu tahun terakhir. Penanggung jawab aksi 8 (review kinerja tahunan) adalah Bappeda. Evaluasi proses penanggulangan stunting ditampilkan pada tabel 1.

Tabel 1. Evaluasi Proses Penanggulangan Stunting di Lombok Timur

Aksi Penanggulangan Terintegrasi	Stunting	Status Implementasi			Capaian Output (%)	Target (%)
		Belum	Dalam proses	Sudah		
Aksi 1: Analisis situasi				X	100	100
Aksi 2: Rencana kegiatan				X	100	100
Aksi 3: Rembuk stunting				X	100	100
Aksi 4: Perbup peran desa				X	100	100
Aksi 5: Pembinaan KPM				X	100	100
Aksi 6: Sistem manajemen data				X	100	100
Aksi 7: Pengukuran & publikasi data stunting				X	100	100
Aksi 8: Review kinerja tahunan				X	100	100

Sumber: Data primer diolah

Sebagaimana ditampilkan sebelumnya pada tabel 1 bahwa aksi 4 (perbup peran desa), aksi 5 (pembinaan KPM), aksi 6 (sistem manajemen data), aksi 7 (pengukuran dan publikasi data stunting), dan aksi 8 (review kinerja tahunan) sudah diimplementasikan masing-masing dengan capain output (100 persen) sesuai dengan target (100 persen). Disisi lain, semua aksi terintegrasi yakni sebanyak 8 aksi diimplementasikan untuk percepatan penanggulangan stunting di sejumlah desa kantong-kantong stunting yang dikenal dengan “desa lokus”. Kriteria desa lokus ini sebelumnya telah dibahas pada aksi (analisis situasi).

Evaluasi Hasil

Di Lombok Timur terdapat 239 desa dimana jumlah desa lokasi meliputi 10 desa pada tahun 2019, kemudian sebanyak 22 desa pada tahun 2020, serta 29 desa pada tahun 2021, 2022, dan 2023 sebagaimana ditampilkan pada tabel 2. Disisi lain, hasil (outcome) yang diperoleh dari percepatan penanggungan stunting di desa-desa lokus tersebut adalah turunnya prevalensi angka stunting sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.

Tabel 2. Desa Lokus dan Angka Prevalensi Stunting di Lombok Timur

Tahun	Jumlah Desa Lokus	Angka Prevalensi Stunting (%)
2018	0	26,45
2019	10	26,11
2020	22	21,07
2021	29	18,13
2022	29	16,92
2023	29	16,18

Sumber: Data Primer

Sumber angka prevalensi stunting meliputi data elektronik pencatatan dan pelaporan berbasis masyarakat (eppgm) yang diperoleh secara langsung sebagai data primer di lapangan dan hasil Survei Status Gizi Nasional (SSGI). Dalam penelitian ini, angka prevalensi stunting sebagaimana ditampilkan pada tabel 2 diperoleh dari “eppgm”.

Dalam penelitian ini, dari hubungan antara desa lokus (X) dengan prevalensi stunting (Y) diperoleh persamaan regresi $Y=53,611-1,391X$ dengan koefisien regresi (β) sebesar minus (-1,391) dan signifikan pada nilai t hitung sebesar 2,881 pada taraf signifikansi $\alpha 0,045$ ($0,045 < 0,05$). Ini menggambarkan bahwa penanggulangan stunting pada desa lokus berpengaruh signifikan terhadap penurunan prevalensi angka stunting. Sekitar 59,40 persen penurunan angka stunting dipengaruhi oleh penanggulangan stunting di desa lokus sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R^2 adjusted) sebesar 0,594. Nilai koefisien korelasi (r) antara desa lokus (X) dengan prevalensi stunting (Y) diperoleh sebesar minus (-0,821) dengan taraf signifikansi $\alpha 0,022$ ($0,022 < 0,05$). Koefisien korelasi (r) negatif dinyatakan “sangat kuat” pada rentang nilai minus (-0,821) hingga minus (-1) (Harrel, 2015). Dengan perkataan lain, terdapat korelasi negatif yang “sangat kuat” dan signifikan antara penanggulangan stunting di desa lokus dengan angka prevalensi stunting. Artinya, semakin banyak desa lokus sebagai lokasi penanggulangan stunting, maka angka prevalensi stunting semakin menurun. Regresi dan korelasi hubungan antara desa lokus (X) dan prevalensi stunting (Y) ditampilkan pada tabel 3.

Di Lombok Timur terdapat 254 desa/kelurahan dengan rincian 239 desa dan 15 kelurahan. Tingkat prevalensi stunting pada 254 desa/kelurahan yakni prevalensi stunting “sangat tinggi” terdapat pada 42 desa/kelurahan, “tinggi” pada 77 desa/kelurahan, “rendah” pada 92 desa/kelurahan, “sangat rendah” pada 43 desa/kelurahan. Ini menggambarkan bahwa prevalensi stunting “rendah” dan “sangat rendah” terdapat pada 135 desa/kelurahan (53,15 persen) atau lebih dari separuh total kelurahan/desa di Lombok Timur. Sedangkan prevalensi stunting “sangat tinggi” dan “tinggi” terdapat pada 119 desa/kelurahan (46,85 persen).

Tabel 3. Hubungan Desa Lokus (X) dengan Prevalensi Stunting (Y)

Uraian	Nilai	Signifikansi
Persamaan regresi	$Y=53,611-1,391X$	
Koefisien regresi (β)	-1,391	
t hitung	2,881	$\alpha 0,045$
Koefisien korelasi (r)	-0,821	$\alpha 0,022$
R^2 adjusted	0,594	

Sumber: Data primer diolah

Semula pada tahun 2019 terdapat 10 desa lokus kemudian berkembang menjadi 29 desa lokus pada tahun 2023. Penanggulangan stunting tidak hanya di desa lokus, melainkan juga di desa non-lokus. Dalam pada itu, penanggulangan stunting di desa non-lokus seperti Desa Pengkelak Mas dapat menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 19,68 persen pada tahun 2021 menjadi 10,01 persen pada tahun 2022 dan turun lagi menjadi 4,97 persen pada tahun 2023. Keberhasilan Desa Pengkelak Emas dalam menurunkan angka prevalensi stunting hingga dibawah 14 persen tersebut dapat dijadikan “good practices” untuk mencapai target nasional penurunan angka prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024 di Lombok Timur. Dana desa yang dialokasikan Desa Pengkelak Mas untuk penanggulangan stunting mencapai Rp.163 juta pada tahun 2022 kemudian meningkat menjadi Rp.371 juta pada tahun 2023. Dengan perkataan lain, Desa Pengkelak Emas hendaknya dapat dijadikan sebagai “desa model” yakni pusat pembelajaran (*centre of learning*) bagi desa-desa lainnya di Lombok Timur dalam rangka percepatan penurunan angka prevalensi stunting. Di Lombok Timur terdapat 21 kecamatan dan keberhasilan penanggulangan stunting pada salah satu kecamatan di Lombok Timur yakni Kecamatan Aikmel ditampilkan pada Kotak 1.

Kotak 1. “Penanggulangan Stunting di Kecamatan Aikmel”

Angka prevalensi stunting di Kecamatan Aikmel mengalami penurunan dari 46,27 persen pada tahun 2019 menjadi 27,08 persen pada tahun 2020. Dari 15 desa di Kecamatan Aikmel prevalensi penurunan stunting terjadi pada 14 desatermasuk di desa lokus, kecuali 1 desa yang mengalami peningkatan prevalensi stunting.

Keberhasilan penurunan prevalensi stunting di Kecamatan Aikmel dapat terwujud karena melibatkan lintas sektor dan lintas program dalam implementasi 8 (delapan) aksi terintegrasi. Selain itu, penanggulangan stunting di Kecamatan Aikmel juga didukung oleh Tim Penggerak PKK melalui gerakan masyarakat yang disebut Cegah Stunting bersama dengan Masyarakat (“Canting Mas”) dengan sasaran remaja putri, pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita atau lebih dikenal dengan 1.000 hari pertama kehidupan.

PENUTUP

Simpulan

1. Proses implementasi penanggulangan stunting meliputi 8 aksi terintegrasi, yaitu: analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, perbup peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi data stunting, review kinerja tahunan. Capaian masing-masing aksi dari kedelapan aksi terintegrasi tersebut di desa lokus telah mencapai 100 persen sesuai dengan target.
2. Penanggulangan stunting di desa lokus berpengaruh signifikan terhadap hasil (outcome) yakni penurunan angka prevalensi angka stunting dari 26,45 persen pada tahun 2018 menjadi 16,18 persen pada tahun 2023. Disisi lain, jumlah desa lokus memiliki korelasi negatif sangat kuat dengan angka prevalensi stunting.

Saran

1. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada evaluasi proses dan evaluasi hasil, kedepan perlu dilakukan penelitian pada evaluasi dampak.
2. Data yang digunakan dalam penelitian yakni data stunting yang bersumber dari “eppgm”, dalam penelitian kedepan perlu dipadankan dengan penggunaan data stunting yang bersumber dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)
3. Diperlukan desa model sebagai pusat pembelajaran dalam rangka percepatan penurunan angka prevalensi stunting.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J.E., (2013). *Public Policymaking: An Introduction*. Fifth edition, Houghton Mifflin Company, Boston, New York.
- Aria Phitra F. et al, (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Lokus Stunting Kabupaten Merangin Tahun 2022*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 12(3):127-141.
- Dunn, William, N., (2004). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Fischer, F. et al., (2013). *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. CRC Press Taylor & Francis Group, New York.
- Gusmiyati dan Rahmadani Y., (2022). *Evaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Pasaman Barat*. Journal of Policy, Governance, Development, and Empowerment, 2(3):200-304.
- Harrel, F.E., (2015). *Regression Modeling Strategies*. Second edition, Springer International Publishing, Switzerland.
- Holzinger, K., (2006). *Methodological Pitfalls of Convergence Analysis*. European Union Politics, 7(2):271-287.
- Hughes, O.E., (2020). *Public Management & Administration: An Introduction*. Palgrave MacMillan, New York..
- Johnson RB et al, (2017). *Toward a Definition of Mixed Methods Research*. Journal of Mixed Methods Research 1(2), 112-133.

- Kabul LM, M.Yasin, A.Subhani, (2021). *Perencanaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana Kebakaran pada Wilayah Pemukiman Padat Penduduk di Kota Mataram*. Geodika:Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi 5(2),313-321.
- Kabul LM, (2023). *Pembangunan Manusia dan Antroposen*. Hikam Media Utama, Yogyakarta.
- Kabul LM, (2015). *Budidaya Lobster Berbasis Kemitraan di Kabupaten Lombok Timur* dalam Prihatini.E.R. et al (ed.): *Membangun Inisiatif Lokal*. PKPM-Bappenas-JICA, Jakarta.
- Keban,Y.T., (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Isu*. Penerbit Grava Media, Yogyakarta.
- Miles, M.B.; Huberman,A. & Saldana J., (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third edition, SAGE, Washington, DC.
- Novasetianie et al., (2023). *Evaluasi Kebijakan Aksi Percepatan Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021*. Avicenna: Journal Ilmiah, 18(1):279-284.
- Quade, E.S., (2012). *Analysis for Public Decision*. Second edition,Elsevier Science Publishing Co., Inc., New York.
- Shafritz, J.M. and Russel, E.W., (2017). *Introducing Public Administration*. Addison Wesley Longman, New York.
- UNDP, (2021). *UNDP Evaluation Guidelines*. United Nations Development Programme, Independent Evaluation Office, New York.
- Wardani Z., (2021). *Sebuah Alternatif Indeks Stunting Sebagai Evalauasi Kebijakan Intervensi Balita Stunting di Indonesia*. Gizi Indonesia: Journal of the Indonesian Nutrition Association, 44(1):21-30.
- Widodo, J., (2001). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia, Jakarta.